



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 48A/SEK/KU.00/02/2017  
Lampiran : Satu set  
Hal : Permintaan Dokumen

Jakarta, 2 Februari 2017

Yth.

1. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
  2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 03/LK-MA/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 hal seperti pada pokok surat, dengan ini diminta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memenuhi permintaan dokumen tersebut (sesuai surat terlampir), mengirimkan dokumen tersebut melalui surel ke [rici.kurnia@bpk.go.id](mailto:rici.kurnia@bpk.go.id), [rosalia@bpk.go.id](mailto:rosalia@bpk.go.id) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing diminta untuk mengawasi dan memonitor permintaan dokumen tersebut dan menegur apabila pengadilan tersebut belum memenuhi permintaan sampai tanggal 14 Februari 2017 dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI



Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
8. Pengendali Teknis Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 2 Februari 2017

Nomor : 03/LK-MA/02/2017  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permintaan Dokumen

Yth.  
**Sekretaris Mahkamah Agung  
di Jakarta**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 9/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017, kami membutuhkan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara, dan PNBP lainnya pada pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN, dan PT TUN Jakarta) dan pengadilan tingkat banding (PT, PTA, dan PT TUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dokumen yang kami butuhkan antara lain:

1. Laporan keadaan perkara Tahun 2015 dan 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 1).
2. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) tahun 2015, namun biaya pendaftarannya disetorkan ke kas negara pada tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 2).
3. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) tahun 2016, namun biaya pendaftarannya belum disetor/disetorkan ke kas negara pada tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 3).
4. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tahun 2015, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 4).
5. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tahun 2016, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 5).
6. Rekapitulasi perkara di pengadilan tingkat pertama yang sisa panjar biaya perkaranya belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 6).
7. Total perkara eksekusi sampai dengan 31 Desember 2016 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas negara (sesuai contoh tabel pada Lampiran 7).
8. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2015, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 8).
9. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2016, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 9).

Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surel ke [rici.kurnia@bpk.go.id](mailto:rici.kurnia@bpk.go.id) dan [rosalia@bpk.go.id](mailto:rosalia@bpk.go.id) (081330491887) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen tersebut dapat kami terima paling lambat hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,



Rici Ricarti Kurnia  
NIP 19800613 200312 1 001

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Penanggung Jawab
6. Pengendali Teknis

## LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 DAN 2016

## Pengadilan Tingkat Pertama

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
<b>A</b>	<b>2015</b>				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				
<b>B</b>	<b>2016</b>				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				

## Pengadilan Tingkat Banding

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
<b>A</b>	<b>2015</b>				
1	Perdata Tingkat Banding				
<b>B</b>	<b>2016</b>				
1	Perdata Tingkat Banding				

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

DAFTAR PERKARA TAHUN 2015 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2015	Tarif PNBPN Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBPN Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBPN yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	<b>Jumlah</b>						

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

**DAFTAR PERKARA TAHUN 2016 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017**

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3x4)</i>	<i>6</i>	<i>7=(5-6)</i>	<i>8</i>
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	<b>Jumlah</b>						

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

**DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2015 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016**

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2015	Tarif PNPB Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNPB Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNPB yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNPB yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNPB yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
I	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	<b>Jumlah</b>						

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2015	Tarif PNPB Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNPB Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNPB yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNPB yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNPB yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
I	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	<b>Jumlah</b>						

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

## DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2016 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2016	Tarif PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBPN yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
I	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	<b>Jumlah</b>						

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBPN Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBPN Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBPN yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBPN yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
I	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	<b>Jumlah</b>						

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.







PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2015 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016

No.	Jenis PNEBP	Tarif PNEBP (Rp)	Jumlah PNEBP (Rp)	Jumlah PNEBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNEBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNEBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN

.....  
NIP.

**PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2016 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017**

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jumlah PNBP (Rp)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	<b>Jumlah</b>					

Jakarta, Februari 2017  
Ketua PN/PA/PTUN

.....  
NIP.